

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK PAKAI. - No. 64. -

**FOTOCOPY DOKUMEN ASET**  
KEMENTERIAN PERTANAHAN DAN PERUMAHAN  
DAFTAR ISIAN 208/19  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KABUPATEN/KOTAMADYA JARUKOTA UTARA  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA JARUKOTA UTARA  
KECAMATAN PAPANGGO  
DESA KELURAHAN

DAFTAR ISIAN 208 92

No. 84/19

DAFTAR ISIAN 307 92

No. 550/19

JAKARTA UTARA

AB 864185/16

0	9	0	2	0	3	0	3	4	0	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TR 250 Papan

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 7005 /IMB/10 91

tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di J. PAPANGO GANG III PAPANGO TG. PRIOK JAKARTA UTARA GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan—Pergunaan Bangunan.

No. 1447 /PIMB-PR / 11 /10 91 tanggal 14 - 8 - /10 91 dari Nama PENDAKI JAKARTA OO. PT. UTA PERTIWI Alamat J. YOS SOETOMO NO. 27-29 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA Untuk Mendirikan Bangunan Baru berluas 5000 m<sup>2</sup> Diatas pekarangan dengan hak tanah: Fakus Agraria Atas nama : PT. UTA PERTIWI Terletak di J. PAPANGO GANG III PAPANGO TG. PRIOK JAKARTA UTARA

Jumlah 2 buah 1201m<sup>2</sup> NO. 14/V/PMT/5/JM/91 Tel.

Bahwa setelah meneliti Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan—Pergunaan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud, dapat dikabulkan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- 1. Peraturan Mendirikan Bangunan Jakarta 1919 - 1941 (DDV 1919 - 1941).
2. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 - (KTY 1941).
3. Peraturan Daerah No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pembangunan dan Perumahan Kota DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Daerah No. 9 tahun 1985 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 316 Tahun 1984, tanggal 20 Februari 1984.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 316 Tahun 1984, tanggal 20 Februari 1984, tentang Tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Table with 3 columns: Name, Address, and Phone Number. Includes Kal. Dinas Tata Kota DKI Jakarta, Kantor Agraria DKI Jakarta, and others.

FOTOCOPY DOKUMEN ASET PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN: Nama PENDAKI JAKARTA OO. PT. UTA PERTIWI Alamat J. YOS SOETOMO NO. 27-29 TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA Untuk Mendirikan Bangunan Baru berluas 5000 m<sup>2</sup> Terletak di J. PAPANGO GANG III PAPANGO TG. PRIOK JAKARTA UTARA sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana Arsitektur & Konstruksi bangunan LAAP.1 pada situasi lampiran II dan persyaratan kesetuan pada lampiran III Keputusan ini.

Table showing retribution amounts: (RPP) Rp. 0.00, (RPT) Rp. 0.00, (RT) Rp. 0.00, Jumlah Rp. 100.00.

- Terbilang SERATUS RUPIAH
III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
IV. Salinan Keputusan ini diterbitkan kepada yang berkepentingan.
V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28... 1991 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN Ir. ERY CHAYARDIPURA NIP. ...



**BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA  
KEWAJIBAN PT. DUTA PERTIWI DI KELURAHAN SUKAPURA,  
KELURAHAN KARTINI, DAN KELURAHAN PAPANGGO  
DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 1 4479/1992

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUKTAR WIDJAJA** : Direktur PT. Duta Pertiwi dan kuasa dari Direktur lainnya dengan Surat Kuasa tanggal 1 Juni 1992 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 237, yang anggaran dasarnya dimusnahkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 November 1986 Nomor 96 tambahan Nomor 1441 dan 1452 terakhir diubah dengan Akta Notaris Betty Kristianto, SH, Nomor 6 tanggal 1 Maret 1986, berkedudukan di Jalan Kali Besar Barat Nomor 8 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **WIYOGO ATMODARMINTO** : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memjalani jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, bertindak untuk dan atas nama Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Duta Pertiwi dengan Akta Notaris Winarti Lukman Wijaya SH, Nomor 6 tanggal 6 Juni 1980 ; -----
2. Perjanjian kerjasama (tambahan) antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Duta Pertiwi dengan Akta Notaris Winarti Lukman Wijaya SH, Nomor 13 tanggal 21 April 1986;
3. Surat Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Duta Pertiwi dengan Akta Notaris Winarti Lukman Wijaya SH, Nomor 8 tanggal 10 April 1991 ; -----
4. Surat Direktur PT. Duta Pertiwi Nomor 071/DIR/DP/III/92 tanggal 14 April 1992 perihal Permohonan Penyerahan Fasum dan Peresmian ; -----
5. Berita Acara Peninjauan Lokasi terhadap sarana dan prasarana kepentingan umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta yang merupakan kewajiban PT. Duta Pertiwi. -----

dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan serah terima bangunan-bangunan sarana kepentingan umum yang terletak di Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kartini dan Kelurahan Papanggo dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** hak pemilikan bangunan-bangunan sarana kepentingan umum yang terletak di Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kartini dan Kelurahan Papanggo sebagaimana daftar terlampir, selanjutnya untuk dicatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

**Pasal 2**

- (1) Penyerahan bangunan-bangunan sarana dan prasarana kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah merupakan pemenuhan sebagian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat-surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas. -----